

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Instansi Pemerintah se-Kabupaten Malinau, serta terselesaikannya penyusunan Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2018. Pelaporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2018 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2018.

Malinau, 29 Maret 2019



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- c. Partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 telah menetapkan 23 sasaran dengan 29 indikator kinerja. Kesemuanya di implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan pelaksana program dan kegiatan tersebut adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,26	12 ,89	97,20%
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,61	8,47	98,37%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	71,50	71,3	99,7%
		Prevalensi Balita Stunting	26,5	32,2	121%
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,62	7,68	99,21%
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi yang aktif terlibat dalam musrenbang	36,73	36,73	100%
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	20	49,82	249%
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	69	104	150%
6	Meningkatkan koneksi antar kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	80	92,7	115,8%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa	Pendapatan perkapita masyarakat	90.331.820	425.000.00	470%
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,300	0,300	100%
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,51	6,77	120,4%
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	27,5	27,5	100%
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor	Tingkat pertumbuhan perdagangan	5,66	5,66	100%

	perdagangan				
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	17,01	60	352%
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	1:450	1:325	72,22%
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0%	0%	0%
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<5,0	4,02	100,5%
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks kualitas udara(ISPU)	0-50	91,51	183,02 %
		Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	100%
		Nilai Sakip	B	CC	86,03%
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100%
		Indeks pembangunan gender	85%	73,77	86,78%
		Indeks pemberdayaan gender	70%	73,78	105,4%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75%	72%	96%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	6.500 Orang	35.823	551,12 %
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	90	34	37,78%
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan	57	-	-
23	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	CC	C	97,40%

	publik	(IKM)			
--	--------	-------	--	--	--

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Reviu	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii

BAB 1 P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG	1
B. PEMBENTUKAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.....	2
C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.....	10
D. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIG ISSUED)</i>.....	13
E. MAKSUD DAN TUJUAN	30
F. SUMBER DAYA MANUSIA	32
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	33

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2016	36
1. VISI	37
2. MISI	39
3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	41
4. INDIKATOR KINERJA	42
5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
6. PROGRAM	48
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	50
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	57
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	60
C. REALISASI ANGGARAN	80

BAB IV P E N U T U P **83**

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malinau menuju *good government* dan *clean government* itulah maka jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau berusaha menyajikan Laporan Kinerja untuk kegiatan Tahun 2018. Pelaporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2018 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV berisi Penutup.

Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021. Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses

perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2018, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD), berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep *good governance*, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2018.

B. PEMBENTUKAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

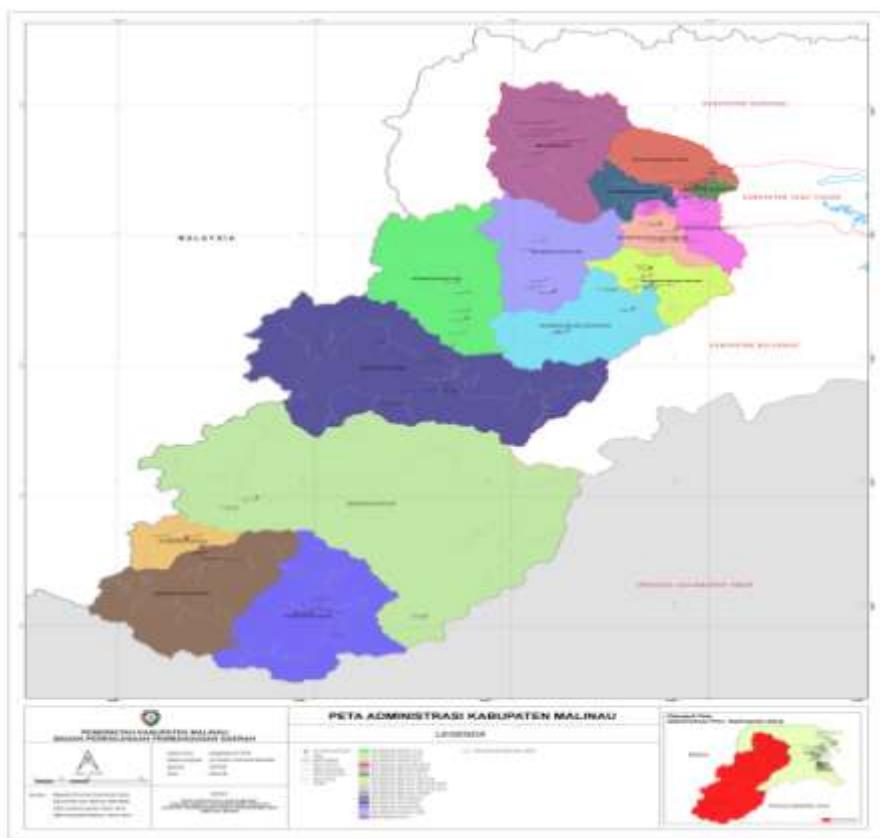
Pemerintah Kabupaten Malinau, yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tersebut, Kabupaten Malinau yang merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, dengan ibukota berkedudukan di Malinau, memiliki luas wilayah \pm 40.088,38 km², yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Malinau Selatan Hilir dan Kecamatan Sungai Tubu.

Secara umum wilayah administrasi Kabupaten Malinau memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Kabupaten Nunukan;
- Sebelah Timur Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
- Sebelah Selatan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Sebelah Barat Negara Malaysia Timur - Sarawak.

Peta wilayah Kabupaten Malinau



1. KONDISI GEOGRAFIS

Sesuai dengan kondisi geografis, Kabupaten Malinau beriklim tropikahumida dengan curah hujan berkisar antara $2.500 \geq 4.500$ mm per tahun, temperatur udara rata 26°C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara $5^{\circ}\text{C} - 7^{\circ}\text{C}$, temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Oktober.

Kabupaten Malinau termasuk Kabupaten yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang sangat potensial dan bervariasi jenisnya, antara lain, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan budi daya hasil-hasilnya,

pertambangan (batu bara, timah, kaolin, pasir kuarsa, emas, dll) dan pariwisata.

Luas wilayah Kabupaten Malinau lebih kurang \pm 40.088,38 km², dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 79.903 jiwa. Jarak ibu kota Malinau ke Tanjung Selor Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara adalah 209 kilometer. Keadaan alam Kabupaten Malinau sebagian besar merupakan dataran tinggi pegunungan serta perbukitan dan daratan rendah, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lahan agroindustri (pertanian, perkebunan, perikanan budi daya ikan dan udang galah).

Sebagai daerah pegunungan dan perbukitan, Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata dan konservasi alam. Akan tetapi jika dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten Malinau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah perdagangan karbon, karena 91 % wilayahnya masih berupa hutan murni.

2. KONDISI DEMOGRAFIS

1. Letak Geografis

Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16 November 2012. Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Malinau terletak antara $114^{\circ}35'22''$ sampai dengan $116^{\circ}50'55''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}21'36''$ sampai dengan $4^{\circ}10'55''$ Lintang Utara. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan ; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Tanah Tidung, Berau dan Kutai Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Hulu, dan Kutai Kartanegara; dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak).

Secara Administratif Kabupaten Malinau berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Nunukan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat

dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Malaysia bagian Timur (Serawak).

Gambar 1.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau



Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, 5 Kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, 2 Kecamatan merupakan penyangga perbatasan (lihat Gambar 1.1), dimana Kabupaten Malinau termasuk sebagai Kabupaten perbatasan yang hanya dapat terjangkau melalui transportasi sungai dan udara yang menuntut biaya sangat tinggi dalam upaya peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.

Keadaan topografi Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Selanjutnya juga dapat dibedakan atas kawasan perbukitan terjal di sebelah utara bagian Barat, perbukitan sedang bagian tengah, dan daratan bergelombang landai dibagian Timur. Perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat merupakan jalur pengunungan dengan ketinggian 1.500 m – 3.000m diatas permukaan laut. Keadaan perbukitan lereng ini memiliki sudut lereng lebih dari 30%

dan untuk daerah yang merupakan dataran tinggi, kemiringan berkisar 8 – 15%. Sedangkan untuk Daerah perbukitan, kemiringan sangat terjal diatas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

Ditinjau dari segi administrasi, wilayah Kabupaten Malinau terdiri dari 15 kecamatan, yakni:

1. **Kecamatan Malinau Kota**, terdiri atas 6 desa yakni: Desa Malinau Kota, Desa Malinau Hulu, Desa Malinau Hilir, Desa Tanjung Keranjang, Desa Batu Lidung, Desa Pelita Kanaan;
2. **Kecamatan Malinau Utara**, terdiri atas 12 desa yakni: Desa Respen Tubu, Desa Semenggaris, Desa Putat, Desa Malinau Seberang, Desa Luso, Desa Belayan, Desa Kaliamok, Desa Lubak Manis, Desa Kelapis, Desa Salap, Desa Seruyung, Desa Sembuak Warod;
3. **Kecamatan Malinau Barat**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Tanjung Lapang, Desa Kuala Lapang, Desa Taras, Desa Sesua, Desa Sempayang, Desa Sentaban, Desa Long Knipe, Desa Long Bila, Desa Punan Bengalun;
4. **Kecamatan Malinau Selatan**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Paya Saturan, Desa Punan Rian, Desa Laban Nyarit, Desa Nunuk Tanah Kibang, Desa Langap, Desa Long Loreh, Desa Sengayan, Desa Pelencau, Desa Bila Bekayuk;
5. **Kecamatan Mentarang**, terdiri atas 9 desa yakni: Desa Long Bisai, Desa Paking, Desa Long Gafid, Desa Harapan Maju, Desa Mentarang Baru, Desa Temalang, Desa Long Liku, Desa Lidung Keminci, Desa Pulau Sapi;
6. **Kecamatan Mentarang Hulu**, terdiri atas 7 desa yakni: Desa Long Berang, Desa Long Sulit, Desa Long Mekatif, Desa Long Kebinu, Desa Semamu, Desa Long Pala dan Desa Long Simau;
7. **Kecamatan Pujungan**, terdiri atas 9 desa yakni : Desa Long Lame, Desa Long Aran, Desa Long Pua, Desa Long Paliran, Desa Belaka Pitau, Desa Long Jelet, Desa Long Ketaman, Desa Pujungan, Desa Long Bena;
8. **Kecamatan Bahau Hulu**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Long Alango, Desa Long Tebulo, Desa Long Uli, Desa Long Kemuat, Desa Long Berini, Desa Apau Ping;
9. **Kecamatan Sungai Boh**, terdiri atas 6 desa yakni : Desa Mahak Baru, Desa Dumu Mahak, Desa Long Lebusan, Desa Agung Baru, Desa Data Baru, Desa Long Top;

10. **Kecamatan Kayan Hulu**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Nawang Baru, Desa Long Temuyat, Desa Long Payau, Desa Long Betaoh, Desa Long Nawang;
11. **Kecamatan kayan Hilir**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Data Dian, Desa Sungai Anai, Desa Long Sule, Desa Long Metun, Desa Long Pipa;
12. **Kecamatan Kayan Selatan**, terdiri atas 5 desa yakni : Desa Long Ampung, Desa Long Uro, Desa Metulang, Desa Sungai Barang, Desa Lidung Payau;
13. **Kecamatan Malinau Selatan Hulu**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Long Lake, Desa Punan Mirau, Desa Long Rat, Desa Halanga, Desa Metut, Desa Long Jalan, Desa Mahakramo Baru, Desa Tanjung Nanga.
14. **Kecamatan Malinau Selatan Hilir**, terdiri atas 8 Desa yakni : Desa Setulang, Desa Setarap, Desa Punan Setarap, Desa Batu Kajang, Desa Gong Solok, Desa Punan Gong Solok, Desa Long Adiu dan Desa Punan Long Adiu;
15. **Kecamatan Sungai Tubu**, terdiri dari 5 Desa yakni Desa Long Titi, Desa Long Ranau, Desa Rian Tubu, Desa Long Nyau, Desa Long Pada.

2. Gambaran Umum Demografis

Masalah kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri.

Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan data kependudukan sangat diperlukan baik mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Malinau tahun 2018 sebanyak 79.903 jiwa dan 20.959 KK, yang terdiri dari 42.260 laki-laki dan 37.643 perempuan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 yang sebanyak 78.102 jiwa maka mengalami peningkatan sebesar 0,98%.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 25.010 jiwa, disusul Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Barat masing-masing sebesar 14.302 jiwa dan 11.228 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil ada di Kecamatan Sungai Tubu dan Kecamatan Mentarang Hulu dengan masing-masing sebesar 856 jiwa dan 1.003 jiwa.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang paling luas wilayahnya pasca pemekaran wilayah di Kalimantan Utara (UU No. 20 tahun 2012) yakni sekitar 54,8 persen dari luas Kalimantan utara , dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Ini berarti bahwa kurang seimbangnya antara jumlah penduduk dengan luas Kabupaten Malinau.

Tabel

1.1

Luas Wilayah Kabupaten Malinau Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
			Km ²	%
1	Malinau Kota	6	142,07	0,35
2	Malinau Utara	12	1.091,19	2,72
3	Malinau Barat	9	767,12	1,91
4	Malinau Selatan	9	1.153,35	2,88
5	Mentarang	9	535,15	1,33
6	Mentarang Hulu	7	2.924,65	7,30
7	Pujungan	9	6.539,39	16,57
8	Bahau Hulu	6	3.098,98	7,73
9	Sungai Boh	6	3.112,18	7,76
10	Kayan Hulu	5	735,40	1,83
11	Kayan Hilir	5	11.863,19	29,59
12	Kayan Selatan	5	3.138,59	7,83
13	Malinau Selatan Hulu	8	2.171,14	5,42
14	Malinau Selatan Hilir	8	572,20	1,43
15	Sungai Tubu	5	2.243,78	5,60
Jumlah		109	40,088,41	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Malinau pada tahun 2018, penduduk Kabupaten Malinau berjumlah 79.903 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 42.260 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 37.643 jiwa.

Tabel 1.2

Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Malinau Kota	13.183	11.827	25.010
2	Malinau Utara	7.651	6.651	14.302

3	Malinau Barat	5.878	5.350	11.228
4	Malinau Selatan	2.393	2.024	4.417
5	Mentarang	3.058	2.894	5.952
6	Mentarang Hulu	544	489	1.033
7	Pujungan	1.007	891	1.898
8	Bahau Hulu	762	634	1.396
9	Sungai Boh	1.284	1.143	2.427
10	Kayan Hulu	1.334	1.203	2.537
11	Kayan Hilir	847	695	1.542
12	Kayan Selatan	1.021	964	1.985
13	Malinau Selatan Hulu	1.238	1.103	2.381
14	Malinau Selatan Hilir	1.561	1.378	2.939
15	Sungai Tubu	459	397	856
Jumlah		42.260	37.643	79.903

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2018

C. ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malinau diberikan kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksudkan di atas terdiri atas kewenangan wajib meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;

5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malinau juga menyelenggarakan urusan lain-lain yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah (Tipe A);
- b. Sekretariat DPRD (Tipe C);
- c. Inspektorat Daerah (Tipe A);
- d. Dinas daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan (Tipe B);
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tipe A);
 3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial (Tipe A);
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
 7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);

9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Tipe B);
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe B);
 11. Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tipe A);
 12. Dinas Perhubungan (Tipe C);
 13. Dinas Ketahanan Pangan (Tipe B);
 14. Dinas Pertanian (Tipe C);
 15. Dinas Perikanan (Tipe C);
 16. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
 18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran (Tipe A).
- e. Badan Daerah terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Tipe A);
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Tipe A);
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe C);
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Tipe
- f. Kecamatan terdiri atas :
1. Kecamatan Malinau Kota (Tipe A);
 2. Kecamatan Malinau Utara (Tipe A);
 3. Kecamatan Malinau Barat (Tipe A);
 4. Kecamatan Malinau Selatan (Tipe A);
 5. Kecamatan Mentarang (Tipe A);
 6. Kecamatan Mentarang Hulu (Tipe A);
 7. Kecamatan Pujungan (Tipe A);
 8. Kecamatan Bahau Hulu (Tipe A);
 9. Kecamatan Sungai Boh (Tipe A);
 10. Kecamatan Kayan Hulu (Tipe A);
 11. Kecamatan Kayan Hilir (Tipe A);
 12. Kecamatan Kayan Selatan (Tipe A);
 13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Tipe A);
 14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir (Tipe A); dan
 15. Kecamatan Sungai Tubu (Tipe A);

D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Analisis isu strategis Kabupaten Malinau dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam

perumusan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021. Selain itu, analisis isu strategis Kabupaten Malinau juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran antara target dan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Malinau.

1. Permasalahan Geografi dan Demografi

Kabupaten Malinau, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999, memiliki dua penyebutan sebagai “Kabupaten Perbatasan dan Kabupaten Konservasi” . dengan Wilayah Kabupaten Malinau yang sangat luas dan sebagian besar merupakan kawasan hutan, dataran dengan aliran sungai, daerah pegunungan, dan kawasan perbatasan serta Luas Wilayah Konservatif tentu memiliki beban pembangunan daerah. Dari sisi kawasan Perbatasan Permasalahan utama yang harus diatasi adalah ketertinggalan dan keterisolasi masyarakat desa yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan dan perbatasan; serta kesenjangan antardesa. Dari sisi Kawasan Konservatif Kabupaten Malinau terbatas untuk mengelolah kawasan Hutan Produktif yang menghambat eksploitasi hutan guna kepentingan masyarakat dalam konteks pembangunan daerah.

Melihat dari pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau dari tahun ketahun semakin meningkat. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Malinau adalah sebesar 62.580 jiwa. Sementara pada tahun 2016, jumlah penduduk mencapai 80.619 jiwa. Peningkatan yang cukup tinggi ini diindikasikan karena adanya perpindahan penduduk yang datang ke Malinau (imigrasi). Di satu sisi, pertambahan penduduk akan menjadi potensi peningkatan produksi. Di sisi lain, pertambahan penduduk akan menjadi beban daerah apabila penduduk dari luar daerah tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai permodalan. Permasalahan yang harus diatasi adalah kurang meratanya persebaran penduduk antarkecamatan, belum tertatanya administrasi kependudukan, dan terbatasnya prasarana dan sarana publik.

Selain itu, Sebagai dampak dari penurunan harga komoditas tambang dan perkebunan, perlambatan kegiatan pertambangan dan perkebunan, dan pemutusan hubungan kerja, jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Malinau cenderung meningkat. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, belum efektifnya program dan kegiatan yang bersifat padat karya dari SKPD dan belum adanya realisasi kerjasama investasi dengan pelaku usaha untuk menciptakan kesempatan kerja baru.

2. Permasalahan Kesejahteraan Masyarakat

a. Perekonomian Daerah

Melihat dampak penurunan permintaan komoditas pertambangan dan perkebunan membawa dampak terjadinya penurunan produksi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya kerjasama antar perangkat daerah dalam mendorong percepatan dan pemulihan ekonomi daerah, belum adanya sinergi antara perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mendorong pengembangan komoditas unggulan di setiap desa dan kecamatan, belum berkembangnya kerjasama investasi dan perdagangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Struktur ekonomi Kabupaten Malinau saat ini menunjukkan dominasi kegiatan berbasis sumber daya alam terutama pertanian, pertambangan dan penggalian dengan total sumbangannya terhadap nilai PDRB Kabupaten Malinau secara rata-rata lebih dari 50 persen. Tingginya ketergantungan pada pertambangan dan penggalian membuat perekonomian Kabupaten Malinau sangat rentan terhadap gejolak dan fluktuasi harga batubara di pasar internasional. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

b. Permasalahan Pembangunan Manusia

Perkembangan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malinau menunjukkan kemajuan pembangunan terutama

pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah terbatasnya tenaga pendidikan dan kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan; serta belum optimalnya pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

c. Permasalahan Kemiskinan

Penduduk Kabupaten Malinau sebagai besar tinggal di daerah perdesaan dengan taraf hidup yang terbatas. Pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan terutama Gerakan Desa Membangun telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 2,59 ribu jiwa dalam lima tahun atau Menurun dari 11,68 persen pada tahun 2012 menjadi 7,15 persen pada tahun 2016. Pembangunan yang mengutamakan masyarakat desa di Kabupaten Malinau mempunyai dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Malinau bersifat multidimensi tidak hanya menyangkut rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan pemenuhan hak dasar rakyat atas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi. Permasalahan yang harus diatasi adalah belum optimalnya kerjasama antar OPD dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar rakyat perdesaan terutama dalam hal penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan rasa aman, dan partisipasi; belum optimalnya kerjasama antar OPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat; belum optimalnya pelaksanaan revitalisasi pertanian; serta belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

d. Permasalahan Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Malinau bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa wisata/budaya, meningkatkan kualitas

karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, Inovasi dan kreatifitas dalam mengelola museum sebagai aset daerah yang bernilai tinggi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

- a) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah;
- b) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal;
- c) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- d) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana pelaku budaya/kesenian daerah;
- f) Inovasi dan kreatifitas pelaku kesenian/budaya masih rendah;
- g) Kualitas sumber daya manusia pelaku budaya masih terbatas;
- h) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial.

Selain itu, dalam mewujudkan peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa atau dapat dikatakan sebagai tulang punggung bangsa untuk masa yang akan datang, peranan pemuda sangatlah penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang handal serta dalam pembangunan daerah. Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai selama ini cukup berdampak pada kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau namun beragam Permasalahan dan kendala yang dihadapi menjadi penghambat dalam pengembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi :

- a) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;
- b) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, miras masih cukup tinggi;
- c) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olahraga belum memadai;
- d) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah;
- e) Pemuda belum sebagai “agent of change”;
- f) Pembinaan olahraga belum optimal;
- g) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.

4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

a. Permasalahan Pendidikan

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Malinau untuk jenjang pendikan SMP/MTs tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Perluasan jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai saat ini ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SMP/MTs masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Pelayanan pendidikan tinggi di Politeknik Kabupaten Malinau terus berkembang. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan lulusan politeknik dan belum berkembangnya kerjasama dengan perguruan tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Malinau.

b. Permasalahan Kesehatan

Pengembangan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan dan penyediaan obat-obatan. Selain itu, derajat kesehatan masyarakat juga sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat dan ketersediaan pasokan makanan dan gizi; serta perbaikan prasarana dan sarana sanitasi dan lingkungan tempat tinggal.

Permasalahan yang harus diatasi dalam kurun waktu 2016-2021 adalah terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan, belum optimalnya Puskesmas dan Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa; terbatasnya jumlah tenaga kesehatan terutama dokter umum dan dokter spesialis, tenaga farmasi

dan ahli gizi untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan; serta belum optimalnya Rumah Sakit Umum Daerah sebagai rumah sakit rujukan.

5. Permasalahan Prasarana dan Sarana Daerah

a. Permasalahan Transportasi

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang baik antar desa, antar kecamatan antar kabupaten dan antar negara. Transportasi di Kabupaten Malinau mencakup pengembangan transportasi darat, sungai, laut dan udara. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jalan beraspal dibanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Hal ini menyebabkan kurang lancarnya lalu lintas penduduk dan barang antar desa dan antar kecamatan. Selain itu, Pembangunan jalan Negara dan jalan provinsi realisasinya selama lima tahun terakhir masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total jalan yang dibutuhkan untuk dibangun. Kondisi ini menyiratkan kurangnya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan di Kabupaten Malinau. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya transportasi darat yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi darat berupa jalan di Kabupaten Malinau sebagian besar masih berupa jalan tanah. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya akses jalan terutama di daerah pedalaman dan perbatasan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan barang, membuka keterisolasian dan mempercepat kamajuan desa.

Dari segi intensitas transportasi udara, jumlah penerbangan dan jumlah penumpang di Kabupaten Malinau terus meningkat. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya lapangan terbang perintis; serta terbatasnya jangkauan dan jalur penerbangan terutama menuju desa-desa dan kecamatan-kecamatan di daerah pedalaman dan perbatasan.

Transportasi sungai dan laut di Kabupaten Malinau juga terus meningkat terutama transportasi barang dari luar daerah masuk ke

Kabupaten Malinau. Permasalahan yang harus diatasi adalah terbatasnya tambatan perahu dan pelabuhan, dan terbatasnya jangkauan transportasi air untuk mengangkut hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

b. Permasalahan Komunikasi dan Informasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antar penduduk dan antar desa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau secara bertahap semakin baik. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

c. Permasalahan Air Minum

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Perkembangan rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Malinau menunjukkan adanya perbaikan terhadap akses air bersih. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya pengelolaan sumber air baku dan terbatasnya jaringan air bersih yang murah dan terjangkau terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

d. Permasalahan Listrik

Ketersediaan listrik sangat penting untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Rumah tangga pengguna utama listrik di Kabupaten Malinau telah mencapai lebih dari 60 persen. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah belum optimalnya jangkauan pelayanan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan kawasan perbatasan.

Isu Strategis

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan ancaman

(threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

(1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan Kabupaten Malinau

Berbagai sumber daya sebagai kekuatan yang diperkirakan dapat mendukung pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Kabupaten Malinau merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya pertanian dan pertambangan;
- b. Kabupaten Malinau memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat sehingga menjadi perekat dan pemersatu masyarakat dalam memajukan Kabupaten Malinau;
- c. Kabupaten Malinau memiliki keragaman sumber daya alam hayati yang beragam, dan memiliki potensi jasa lingkungan kehutanan;
- d. Kabupaten Malinau telah mengembangkan desa wisata dan destinasi wisata budaya sebagai modal bagi pengembangan ekonomi wilayah;
- e. Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang sudah berjalan selama 18 tahun sehingga penuh harapan dan dinamika untuk meraih kemajuan;
- f. Kabupaten Malinau berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dengan kemiripan dan persamaan budaya lokal yang unik sebagai dasar membangun kemitraan dan kerjasama yang bermanfaat, adil dan saling menguntungkan;
- g. Pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) sejak tahun 2012 secara bertahap telah menumbuhkan kesadaran, semangat dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memajukan kehidupan desa;
- h. Kabupaten Malinau telah melaksanakan berbagai terobosan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan daerah terutama di desa dan kecamatan;
- i. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT menjadi bagian dari berkembangnya dan manajemen kepimpinan di tingkat RT yang demoraktis, transparan dan akuntabel sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- j. Perkembangan forum partisipasi dan komunikasi pembangunan desa memperkuat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga memperkuat dukungan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Malinau.

(2) Identifikasi dan Analisis Kelemahan Kabupaten Malinau

Berbagai kelemahan yang diperkirakan dapat menghambat kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga akan berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, dan tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Belum siapnya masyarakat menghadapi pergeseran budaya dan perkembangan teknologi informasi yang cepat sehingga membawa dampak terjadinya budaya kagetan dan memudarnya nilai-nilai budaya masyarakat Malinau;
- c. Belum meratanya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan; prasarana dan sarana air bersih, pembangkit dan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan informasi;
- d. Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu terutama bagi masyarakat desa;
- e. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan di desa dan kecamatan yang disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumber daya aparatur;
- f. Belum berkembangnya adanya industri hilir yang mampu mengolah sumber daya alam, khususnya pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan menjadi komoditas industri yang memiliki nilai tambah;
- g. Belum berkembangnya kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- h. Masih terbatasnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam terutama pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebagai akibat terbatasnya modal, sarana dan prasarana pendukung;
- i. Belum tertatanya infrastruktur perekonomian (jaringan jalan, transportasi, pembangkit dan jaringan listrik, dan air baku) yang menghambat pengembangan usaha.
- j. Terbatasnya kapasitas birokrasi dan aparatur daerah akan menghambat upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah;

- k. Belum optimalnya penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Malinau akan menghambat pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan;
- l. Belum tertatanya manajemen kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah akan menyebabkan pengelolaan sumber daya daerah menjadi kurang efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- m. Belum adanya manajemen pengembangan kecamatan yang terpadu dan terukur akan menghambat kemajuan pembangunan daerah;
- n. Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, industri pengolahan dan pariwisata di Kabupaten Malinau akan menyebabkan kurangnya daya tarik dan daya saing daerah.

(3) Identifikasi dan Analisis Peluang Kabupaten Malinau

Globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya perpindahan barang dan jasa, modal, dan informasi lintas daerah dan lintas negara secara bebas, serta interaksi pasar lokal, pasar nasional dan pasar internasional secara lebih terbuka dan cepat memberi peluang bagi masa depan Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Perluasan jaringan transportasi akan meningkatkan mobilitas penduduk dan barang dari dan ke Kabupaten Malinau;
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong perbaikan manajemen pembangunan daerah Kabupaten Malinau;
- c. Perluasan jaringan dan kerjasama internasional baik Masyarakat Ekonomi ASEAN, kerjasama APEC dan kerjasama internasional lainnya akan mendorong perubahan nilai, etos kerja dan budaya kerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagi masyarakat, pelaku usaha dan aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau;
- d. Perluasan pasar regional dan internasional akan meningkatkan kegiatan investasi dan produksi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, pariwisata dan perdagangan dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Malinau;
- e. Perluasan jaringan dan kerjasama investasi, perdagangan dan pariwisata nasional dan internasional berbasis teknologi informasi akan dapat

menciptakan peluang yang lebih besar bagi pengembangan pertanian, perikanan, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata Kabupaten Malinau baik wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata kuliner; perluasan kesempatan kerja; peningkatan pendapatan; dan perluasan jaringan sosial budaya masyarakat.

Demokratisasi yang ditandai oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik dengan mengutamakan apsiliasi dan partisipasi rakyat memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, yaitu:

- a. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan adil dengan mempertimbangkan pentingnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Proses perumusan kebijakan dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan jender, keistimewaan, kekhususan dan keragaman masyarakat;
- c. Proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan; serta pengendalian dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, aman, nyaman, bermutu dan bermartabat.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan sumber daya yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu:

- a. Perluasan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan percepatan kemajuan daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten Malinau akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada

- masyarakat secara lebih baik, maju, cepat, mudah, terjangkau dan bermutu;
- c. Pemerintah Kabupaten Malinau dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Malinau;
 - d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan daerah akan memperhitungkan penghormatan, perlindungan dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial budaya daerah, kearifan lokal, kekhususan dan keragaman masyarakat.

(4) Identifikasi dan Analisis Ancaman Daerah

Globalisasi membawa dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan Kabupaten Malinau akan mendorong pemanfaatan lahan dan wilayah secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kerusakan lingkungan dan menghambat kesinambungan pembangunan;
- b. Perdagangan yang terus meningkat mendorong arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara lain secara lebih cepat dan lebih banyak dan selanjutnya akan mendominasi pasar lokal di Kabupaten Malinau yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Malinau;
- c. Krisis pangan, krisis ekonomi, krisis energi dan menurunnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, meningkatkan angka kriminalitas, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Malinau;

Demokratisasi memerlukan proses pendidikan politik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ketidaksiapan dalam melaksanakan demokrasi kemungkinan membawa perubahan yang tidak diharapkan bagi rakyat Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Praktik demokrasi secara partisipatif dan konsultatif antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Malinau dengan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan dalam pengambilan

keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan;

- b. Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan tanpa batas dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malinau;
- c. Tata kelola politik yang cenderung rumit, adanya dominasi elit dan terjadinya konflik menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat di Kabupaten Malinau.

Desentralisasi dan otonomi daerah membawa dampak yang dapat mengganggu efektivitas, kelancaran dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Malinau, yaitu:

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Malinau;
- b. Persaingan antar daerah dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah; penetapan daerah perbatasan; serta pengelolaan infrastruktur cenderung meningkat, menimbulkan konflik dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas dan jangka panjang sehingga menghambat kemajuan daerah;
- c. Lemahnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah terutama jalan, transportasi udara dan sungai; kurang efektifnya pelayanan publik; serta kurang optimalnya pengembangan ekonomi;
- d. Meningkatnya kesenjangan antara Kabupaten Malinau dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Utara mendorong migrasi penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Malinau sehingga menyebabkan meningkatnya beban penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman; pendidikan dan kesehatan; dan tempat usaha.

Dengan memperhatikan permasalahan dan analisis lingkungan strategis eksternal dan internal, isu strategis daerah Kabupaten Malinau dalam lima tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik

- a. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu;
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan pemerintahan terutama di desa dan kecamatan;
- c. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan;
- d. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
- e. Belum tertatanya manajemen aset daerah;
- f. Belum berkembangnya manajemen pengetahuan sebagai pondasi kemajuan daerah.

2 Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia

- a. Belum meratanya akses layanan pendidikan yang bermutu disebabkan antara lain oleh kurangnya prasarana dan sarana, terbatasnya jumlah dan mutu tenaga pengajar, serta belum meratanya persebaran tenaga pengajar;
- b. Belum meratanya akses layanan kesehatan yang bermutu sebagai akibat terbatasnya prasarana dan sarana layanan kesehatan, belum meratanya jumlah dan persebaran tenaga kesehatan, serta kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. Memudarnya penerapan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan kemasyarakatan;
- d. Belum berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan pemuda dan pemudi;
- e. Rendahnya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi yang dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah dan mutu sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; rendahnya budaya masyarakat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; dan belum optimalnya sinergi Pemerintah, pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.

3 Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah

- a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- b. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari industri kerajinan dan rumah tangga;
- c. Belum optimalnya peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
- d. Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- e. Belum tertatanya manajemen dan kelembagaan BUMD, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- f. Belum berkembangnya kegiatan penanaman modal dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah sebagai akibat adanya hambatan status lahan, belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, lemahnya promosi daerah, dan terbatasnya kerjasama antar daerah;
- g. Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung penguatan usaha masyarakat dan pembangunan ekonomi desa;
- h. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah.

4 Belum tertatanya infrastruktur daerah

- a. Terbatasnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Malinau;
- b. Belum meratanya pembangunan jalan arteri primer (jalan utama), jalan lingkungan dan arteri sekunder yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan;
- c. Terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
- d. Belum tertatanya jaringan sanitasi dan air bersih.
- e. Terbatasnya transportasi darat, udara, dan sungai terutama dalam menghubungkan antar desa dan antar kecamatan;

- f. Belum adanya keterpaduan sistem transportasi antara darat, sungai dan udara yang menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Malinau;
- g. Terbatasnya jumlah dan mutu sarana prasarana ketenagalistrikan dan telekomunikasi.

5 Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

- a. Kurangnya kerjasama dan kemitraan para pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan;
- b. Meningkatnya konflik pemanfaatan lahan;
- c. Menurunnya daya dukung lingkungan;
- d. Belum optimalnya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dini dalam menghadapi potensi bencana alam.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Pelaporan Kinerja.

Esensi dari sistem Pelaporan Kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor publik di Kabupaten Malinau. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana baik. Implementasi sistem Pelaporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Malinau dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja

pemerintah Kabupaten Malinau yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu;

1. Pelaporan Kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Presiden, DPRD dan masyarakat).
2. Pelaporan Kinerja adalah sarana upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama Pelaporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Pelaporan Kinerja 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Malinau atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2018.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan Pelaporan Kinerja 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Malinau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Malinau dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau periode 31 Desember 2018 sebanyak 3.365 orang terdiri dari Pria 1.847 orang dan Wanita 1.518 orang dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel data sebagai berikut :

Tabel Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	I/a	2		3
2	I/b	9		10
3	I/c	13		17
4	I/d	12		15
Jumlah Golongan I		36		45
5	II/a	84		147
6	II/b	101		137
7	II/c	200	5	385
8	II/d	217	1	428
Jumlah Golongan II		602	5	1.097
9	III/a	240	9	579
10	III/b	244	9	463
11	III/c	213	1	394
12	III/d	233	9	372
Jumlah Golongan III		930	8	1.808
13	IV/a	213	1	344
14	IV/b	45		49
15	IV/c	20		21
16	IV/d	1		1
17	IV/e	0		0
Jumlah Golongan IV		279	6	415
TOTAL		1.847	1.518	3.365

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam pelaporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sasaran yang bersifat strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2018. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas pada indikator input, output dan

outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pemberbiayaannya berasal dari APBN dan Loan/BLN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Pelaporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan dimasa datang.

Sistematika penyajian Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Malinau dan menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja 2018.

Bab II Perencanaan Kinerja; menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja untuk Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk analisis terhadap capaian indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Bab IV Penutup; menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2018 ini dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Daerah Malinau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau Tahun 2016-2021 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau Tahun 2016–2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah tahun 2018 digunakan RPJMD yang telah ditetapkan, yaitu RPJMD tahun 2016-2021 ditambah dengan APBD Tahun 2018.

RPJMD Malinau sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat pemilihnya, yang akan dicapai dalam periode 2016 - 2021. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Malinau juga memperhatikan tujuan, sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumberdaya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran.

RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; mempertimbangkan kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhitungkan hasil analisis isu strategis; memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025; mengacu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih untuk masa bakti 2016-2021; mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta mengutamakan semangat “Gerakan

Desa Membangun" dengan bertumpu pada kekuatan rakyat, yaitu "Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat"; maka visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016–2021 adalah:

**"Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera
Melalui Gerakan Desa Membangun"**

Visi tersebut mengandung makna bahwa

- **MAJU** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
- **SEJAHTERA** adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralitas, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- **Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)** adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera, Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

GERDEMA didasarkan pada semboyan atau tekad Malinau Berubah Maju Sejahtera yang mengandung semangat untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau bersama-sama berubah dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan. Berubah untuk maju dan maju untuk menggapai kesejahteraan. GERDEMA juga berangkat dari kekuatan pemikiran bahwa membangun Malinau itu harus dimulai dari desa. Desa adalah tempat dan komunitas masyarakat Malinau. Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera ditentukan oleh kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang maju dan sejahtera adalah wujud nyata dari Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera.

GERDEMA adalah paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau dengan bertumpu pada kekuatan rakyat yaitu, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan. GERDEMA menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan.

Paradigma GERDEMA juga merupakan pembaharuan dari paradigma pembangunan sebelumnya, sebagai wujud konsistensi penerapan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Desa ditempatkan sebagai suatu daerah otonom. Penetapan GERDEMA sebagai paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau menegaskan dan sekaligus meluruskan cita-cita Otonomi Desa. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 menegaskan sikap yang konsisten dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

2. M I S I

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;

- (2) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
- (4) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
- (5) Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;
- (6) Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
- (7) Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
- (8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”;
- (9) Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (10) Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
- (11) Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
- (12) Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, pilar pembangunan dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;

3. Penguatan Ekonomi Desa dan Keunggulan Daerah;
4. Ibu Kota Malinau Menjadi Ibu Kota Mandiri;
5. Reformasi Birokrasi Fokus Pada Pelayanan Prima.

Selain itu komitmen daerah dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Revitalisasi Pertanian Untuk Ketahanan Pangan;
2. Ibu Kota Kabupaten Menjadi Kota Mandiri;
3. Malinau Sebagai Tujuan Wisata Nasional dan Internasional;
4. Pengembangan RSUD Kabupaten Malinau sebagai Rumah Sakit Rujukan.

3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

3.1 Tujuan

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Meningkatnya infrastruktur dasar.
4. Meningkatnya perekonomian daerah.
5. Meningkatnya produksi pertanian secara luas.
6. Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri.
7. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA.
9. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
10. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
11. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata.
12. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima.

3.2 Sasaran

1. Meningkatnya mutu pendidikan.
2. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.
3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan.
4. Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
5. Meningkatnya infrastruktur daerah baik diperkotaan maupun perdesaan.

6. Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan.
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan.
8. Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi.
9. Terbukanya lapangan pekerjaan.
10. Mengembangkan produk unggulan.
11. Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan.
12. Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa.
13. Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan.
14. Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA.
15. Meningkatkan kualitas air dan udara.
16. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
17. Meningkatnya kesetaraan gender.
18. Meningkatnya pemberdayaan gender.
19. Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan.
20. Meningkatkan kunjungan wisatawan.
21. Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah
22. Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah
23. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

4. INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Misi				
	1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik		
	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks pembangunan manusia	Meningkatnya Mutu Pendidikan
				Harapan Sekolah
				Rata-Rata Sekolah
				Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat
				Angka harapan hidup
				Prevelensi Balita Stunting

Misi

- 2. Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi**

2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin
			Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif dalam musrenbang

Misi

- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalamau pun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;**

3	Meningkatnya infrastruktur dasar	Tingkat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	Meningkatnya infrastruktur daerah baik diperkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik /mantap
			Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa dengan air bersih yang berkualitas
				Persentase desa yang terjangkau komunikasi

Misi

- 4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;**

4	Meningkatnya perekonomian daerah	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan perkapita masyarakat
			Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini

Misi

- 5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;**

5	Meningkatnya produksi pertanian secara luas	Kontribusi sektor pertanian/per kebunan terhadap PDRB	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran
			Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan

Misi

- 6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;**

6	Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya nilai tambahan dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan
		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri

Misi

- 7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;**

7	Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	Persentase konflik SARA	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk
			Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras

Misi

- 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;**

	8	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas air, udara dan tanah	Indeks kualitas air
					Indeks kualitas udara(ISPU)

		Misi			
		9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);			
	9	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status Laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)
					Nilai Sakip
					Nilai LPPD

		Misi			
		10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;			
	10	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender
				Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender
				Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

		Misi			
		11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;			
	11	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan
				Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif
				Meningkatnya pelestarian kebudayaan	Persentase situs budaya yang terdaftar di

				daerah	Kementerian Kebudayaan
--	--	--	--	--------	---------------------------

Misi

12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat;

12	Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
-----------	--	----------------------------	--	----------------------------------

5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 menekankan pada perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik dengan menyempurnakan dan mempertajam pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang didukung dengan pelaksanaan tiga program unggulan dan 13 program unggulan serta program prioritas lainnya.

Selain itu strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Berikut diuraikan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Malinau dalam Mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Sejalan dengan arahan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025, pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dibagi dalam tahapan arah kebijakan pembangunan dengan prioritas pada penguatan landasan pembangunan, penegasan pengembangan dan pemanfaatan momentum pembangunan, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut dapat dilihat pada gambar berikut mengenai arah kebijakan.

Pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021:

➤ **2016**

Menyiapkan ladangan bagi percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (Tranformasi) Pembangunan Kabupaten Malinau.

➤ **2017**

Memperkuat landasan bagi percepatan (akselerasi) dan Pembaharuan (Tranformasi) pembangunan Kabupaten Malinau.

➤ **2018**

Memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan Pembaharuan (transformasi) Pembangunan Kabupaten Malinau terutama peningkatan penyediaan infrastruktur, dan Pengembangan UMKM.

➤ **2019**

Memantapkan percepatan (akselerasi) dan perubahan (transformasi) pembangunan berbasis industri pengolahan hasil perikanan dan pertanian di Kabupaten Malinau; serta peningkatan mutu pariwisata.

➤ **2020**

Pemantapan percepatan (akselerasi) dan perubahan (transformasi) sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau.

➤ **2021**

Mewujudkan Malinau yang maju dan sejahtera secara nyata sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau.

6. PROGRAM

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta program utama dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016-2021, maka kebijakan umum dikaitkan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

(1) Prioritas 1: RT BERSIH

a. Program RT BERSIH merupakan program unggulan yang menjadi bagian dari penajaman dan perluasan pelaksanaan GERDEMA untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan desa. Program

RT-BERSIH adalah pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga) yang meletakkan tempat (*locus*) pembangunan di tingkat RT;

- b. Program RT-BERSIH menempatkan warga RT sebagai pelaku utama yang aktif dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola sumber daya di tingkat RT dan mengembangkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Ketua dan pengurus RT bersama warga setempat yang merupakan unit komunitas terkecil (*grass root*) sebagai basis dan sekaligus pelaku utama pembangunan yang terlibat langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama;
- c. Program ini dilaksanakan dengan menyediakan Dana RT BERSIH sekurang-kurangnya sebesar Rp.260 juta setiap tahun untuk setiap RT, dengan rincian Dana Tunjangan dan Operasional kepada RT sekurang-kurangnya Rp. 60 juta per tahun; dan Dana Program RT BERSIH sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200 juta per tahun.

- (2) Prioritas 2: Wajib Belajar Enam Belas Tahun dengan Bebas SPP dan bebas pungutan biaya pendidikan dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
- (3) Prioritas 3: Beras Daerah (RASDA) bagi kepentingan konsumsi rakyat Malinau dan kebijakan subsidi beras sejahtera kepada masyarakat yang tidak mampu melalui kebijakan RASDA yang di peroleh dari produksi petani Malinau;
- (4) Prioritas 4: Optimalisasi Kualitas SDM aparatur pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa secara murni;
- (5) Prioritas 5: Optimalisasi Dana Operasional Kecamatan, dan Dana Gerdema kepada dusun dan RT;
- (6) Prioritas 6: Peningkatan pemberian modal usaha tanpa jaminan dan bunga kepada kelompok usaha ekonomi lemah yang ada di desa, RT dan dusun;
- (7) Prioritas 7: Penyediaan Beasiswa kepada anak-anak Malinau yang tidak mampu dan berprestasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- (8) Prioritas 8: Pelaksanaan Tugas Belajar bagi anak yang berprestasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi kejuruan;

- (9) Prioritas 9: Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) bagi anak-anak yang putus sekolah dan bagi mereka yang ingin memperoleh keterampilan tertentu;
- (10) Prioritas 10: Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gratis (Jamkesda) terutama masyarakat yang tidak mampu;
- (11) Prioritas 11: Pembangunan Infrastruktur Kota Mandiri bagi Ibukota Malinau;
- (12) Prioritas 12: Perbaikan Tingkat Kesejahteraan PNS, Kepala Desa, Aparat Desa, Kepala Adat dan Aparat Adat, Ketua BPB dan Anggota, Ketua LPM dan Anggota.
- (13) Prioritas 13: Peningkatan Mutu Pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) di setiap Kecamatan;
- (14) Prioritas 14: Pengembangan Resi Gudang di setiap Kecamatan untuk menampung hasil pertanian dalam arti luas;
- (15) Prioritas 15: Peningkatan Partisipasi Swasta dalam berinvestasi dan pengembangan usaha dan pasar dalam daerah, antar daerah, antar pulau dan internasional terhadap produk lokal melalui pemberian insentif dan kemudahan regulasi;
- (16) Prioritas 16: Pengembangan Dana Kredit Usaha Persiapan Pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS).

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,61
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,50
		Prevalensi Balita Stunting	%	26,5
3	Menurunnya kemiskinan perdesaan	Persentase penduduk miskin	%	7,62
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi yang aktif terlibat dalam musrenbang	%	36,73
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	%	20
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	%	69
6	Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	%	80
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa	Pendapatan perkapita masyarakat	Rp	90.331.820
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	Nilai	0,300
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	%	8,51
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	%	27,5
11	Meningkatnya nilai tambah pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	%	5,66

12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	%	17,01
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	Rasio	1:450
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	%	0%
15	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	Indeks	0<IP<5,0
		Indeks kualitas udara(ISPU)	Indeks	0-50
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP
		Nilai Sakip	Nilai	B
		Nilai LPPD	Status	Tinggi
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	%	85%
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	%	70%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	75%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	Jumlah	6.500 Orang
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	%	90
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (cagar budaya)	%	57
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Indeks	CC

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas			
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,26
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,61
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	71,50
		Prevelensi Balita Stunting	26,5
Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa			
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,62
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi yang aktif terlibat dalam musrenbang	36,73
Tujuan 3 : Meningkatnya Infrastruktur Dasar			
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	20
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	69
6	Meningkatnya konektivitas antar desa dan kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	80
Tujuan 4 : Meningkatnya Perekonomian Daerah			
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dan perkotaan	Pendapatan Perkapita masyarakat	90.331.820

8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks gini	0,300
Tujuan 5 : Meningkatnya produksi pertanian secara luas			
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,51
10	Mengembangkan produk unggulan	Jumlah desa yang memiliki produk unggulan	27,5
Tujuan 6 : Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri			
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	5,66
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	17,01
Tujuan 7 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai			
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	1:450
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik sara	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0%
Tujuan 8 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA			
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<5,0
		Indeks kualitas udara(ISPU)	0-50
Tujuan 9 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel			
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan keungan daerah (Opini BPK)	WTP
		Nilai Sakip	B
		Nilai LPPD	Tinggi
Tujuan 10 : Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan			
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	85%
18	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	70%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75%
Tujuan 11 : meningkatkan kontribusi sektor pariwisata			
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	6.500
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	90
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (cagar	57

		budaya)	
Tujuan 10 : Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan prima			
23	Meningkatnya pelayanan publik	kualitas Indeks masyarakat(IKM)	kepuasan CC

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,26	12 ,89	97,20%
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,61	8,47	98,37%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	71,50	71,3	99,7%
		Prevalensi Balita Stunting	26,5	32,2	121%
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,62	7,68	99,21%
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi yang aktif terlibat dalam musrenbang	36,73	36,73	100%
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	20	49,82	249%
		Persentase desa dengan akses air bersih yang	69	104	150%

		berkualitas			
6	Meningkatkan koneksi antar kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	80	92,7	115,8%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa	Pendapatan perkapita masyarakat	90.331.820	425.000.00	470%
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,300	0,300	100%
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,51	6,77	120,4%
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	27,5	27,5	100%
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan	Tingkat pertumbuhan perdagangan	5,66	5,66	100%
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	17,01	60	352%
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	1:450	1:325	72,22%
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0%	0%	0%
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<5,0	4,02	100,5%
		Indeks kualitas udara(ISPU)	0-50	91,51	183,02%
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	100%
		Nilai Sakip	B	CC	86,03%
		Nilai LPPD	Tinggi	Tinggi	100%
17	Meningkatnya kesetaraan	Indeks pembangunan	85%	73,77	86,78%

	gender	gender			
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	70%	73,78	105,4%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75%	72%	96%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	6.500 Orang	35.823	551,12%
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	90	34	37,78%
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan	57	-	-
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	CC	C	97,40%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2006. Pelaporan Kinerja Tahun 2018 ini merupakan pelaporan kinerja

bertolok ukur RPJM yang memasuki tahun ke-3 (tiga) dari periode RPJM (2016 – 2021).

Pengembangan SAKIP akan terus kami laksanakan walaupun dalam perjalannya masih belum seperti yang diharapkan. Sehingga perlu wujud nyata dari komitmen bersama dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 23 sasaran selama tahun 2018 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Melalui Upaya Penyediaan Tenaga Kerja Terampil Dan Terdidik

Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Pengukuran Tujuan 1 **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas** melalui 2 Sasaran dengan 4 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. I
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Mutu Pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,25	100%	13,26	12,89	97,20%
Rata-Rata Lama	Tahun	8,60	8,88	103%	8,61	8,47	98,37%

Sekolah							
---------	--	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2018 pencapaian rata-rata lama sekolah adalah 8,47 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 8,61. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain;

- Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat tinggi.
- Perluasan akses pendidikan jenjang dasar telah sampai ke tingkat desa.
- Perluasan akses pendidikan menengah sampai di tingkat kecamatan dan desa strategis jumlah penduduknya.

Tabel. 2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Angka harapan hidup	Tahun	71,17	71,06	99,84%	71,50	71,3	99,7%
Prevalensi Balita Stunting	%	27,00 %	27,00%	100%	26,5	32,2	121,5%

Upaya pencapaian sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja angka harapan hidup dengan target tahun 2018 adalah 71,50, realisasi 71,3 dan capaian 99,7%. Pada indikator kinerja prevalensi balita stunting, Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten *Locus Stunting* dari data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2013 mencapai 39%. Realisasi 32,2 % dari data desa Locus Stunting sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	PERSENTASE
1	Desa Malinau Hilir	18,4%
2	Desa Billa Bekayuk	42,1%
3	Desa Sesua	17,9%
4	Desa Long Sule	26,2%

5	Desa Respen Tubu	44,1%
6	Desa Luba Manis	50,0%
7	Desa Luso	17,2%
8	Desa Lebusan	64,9%
9	Desa Nahakramo	20,0%
10	Desa Long Lake	55,9%

Misi 2 : **Meningkatkan Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi**

Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Pengukuran Tujuan 2 **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa** melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Tar get	Realisasi		Tar get	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase penduduk miskin	%	8,06	8,06	100%	7,62	7,68	99,21%

Pada tabel diatas dengan sasaran menurunnya kemiskinan di perdesaan dan indikator kinerja persentase penduduk miskin dengan target tahun 2018 adalah 7,62% dan realisasi 7,68%. Walaupun tahun 2018 tidak memenuhi target yang ditetapkan tetapi berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau Mengalami Penurunan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Malinau pada tahun 2018 sebanyak 6,63 ribu (7,68 persen). Sedangkan pada tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Malinau berjumlah 6,69 ribu (8,06 persen).

Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Malinau 2017-2018

Tahun	Jumlah Miskin (ribu)	Penduduk Miskin(persen)
1	2	3
2017	6,69	8,06
2018	6,63	7,68

Jika diamati dari tabel Jumlah dan Persentase Penduduk miskin Kabupaten Malinau 2017-2018, penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau pada tahun 2018 tidak hanya terjadi secara jumlah, namun juga secara persentase. Secara jumlah, penduduk miskin Kabupaten Malinau tahun 2018 menurun sebanyak 0,06 ribu penduduk dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan secara persentase mengalami penurunan sebesar 0,38%.

Tabel. 4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Partisipatif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Indikator Kinerja	Satua n	Tahun 2017		Capaia n Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaia n Kinerja Tahun 2018 %
		Targe t	Realisasi		Targe t	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat partisipasi masyarakat yang aktif	%	36,26	36,26	100%	36,73	36,73	100%

dalam musrenban g							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti pemerintahan desa (kepala desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan desa (BPD), lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama antar desa dan badan usaha milik desa untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari tabel no 4 dengan indikator kinerja tingkat partisipasi masyarakat yang terlibat dalam musrenbang dengan target 36,73 dengan realisasi 36,73 dengan capaian 100%.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;

Tujuan 3 : Meningkatnya infrastruktur dasar

Pengukuran Tujuan 3 **Meningkatnya infrastruktur dasar** daerah melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya Infrastruktur Daerah Baik Di perkotaan Maupun Perdesaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Targe t	Realisas i		Targe t	Realisas i	
1	2	3	4	5	6	7	8

Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	%	20%	12,51%	62,55%	20%	49,82%	249%
Persentase desa dengan air bersih yang berkualitas	%	-	-	-	69%	104%	150%

Pada tabel diatas pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur daerah baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan indikator Persentase jalan dalam kondisi baik atau mantap untuk tahun 2018 ditargetkan 20% dengan realisasi 49,82% dan capaian 249%. Dengan demikian tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase desa dengan air bersih yang berkualitas dengan target 69% dan untuk capaian tahun 2018 sebesar 104 dan capaian tahun 2018 adalah 150%.

Tabel. 6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Tar get	Realisasi		Tar get	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase desa yang terjangkau komunikasi	%	75	95,41	127,21 %	80	92,7	115,8%

Dalam mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh Indonesia, kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah membangun *Base Transceiver Station* (BTS) secara masif sepanjang tahun 2017 dan 2018.

Untuk Kabupaten Malinau, Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 yang lalu telah membangun 22 *Base Transceiver Station* (BTS) di desa-desa dengan status blankspot. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini merupakan implementasi dari program BTS USO oleh Kementerian Komunikasi

dan Informatika yang dikerjakan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)

Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;

Tujuan 4 : Meningkatnya perekonomian daerah

Pengukuran Tujuan 4 **Meningkatnya perekonomian daerah** daerah melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpuh pada ekonomi desa dan perkotaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capai an Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capai an Kinerja Tahun 2018 %
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan perkapita masyarakat	RP	7.606.247	7.249.695	95,31 %	90.331.820	425.000.000	470%

Dari tabel diatas dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa dengan indikator kinerja pendapatan perkapita masyarakat yang ditargetkan tahun 2018 sebesar 90.331.820 dengan realisasi 425.000.000 dan capaian yang tercapai pada tahun 2018 adalah 470%.

Tabel. 8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Gini		0,3	0,3	100%	0,300	0,300	100%

Dari tabel diatas bahwa sasaran meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan indikator kinerja indeks gini untuk tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100% dari target 0,300 dan realisasi 0,300. Hal ini menunjukan target dan capaian terpenuhi dan meratanya para pelaku usaha yang ada disetiap tempat sehingga adanya pertumbuhan ekonomi dan memacu pendapatan usaha di bidang perekonomian

Misi 5 : Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;

Tujuan 5 : Meningkatnya Produksi Pertanian Secara Luas

Pengukuran Tujuan 5 **Meningkatnya produksi pertanian secara luas** melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Menurunnya angka pengangguran	%	8,52	6,01	129%	8,51	6,77	120,4%

Dari tabel diatas bahwa sasaran terbukanya lapangan pekerjaan dengan indikator kinerja menurunnya angka pengangguran untuk tahun 2018 capaian kinerja sebesar 120,4% dari target 8,51% dan realisasi 6,77.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kabupaten Malinau belum menurun secara signifikan karena;

- Meningkatnya jumlah pencari kerja, disisi lain pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai (antara pencari kerja dan daya serap lapangan pekerjaan tidak seimbang) sehingga memberikan imbas yang cukup berat bagi tenaga kerja di Kabupaten Malinau. Akibatnya pengangguran semakin meningkat seiring dengan ketidak seimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan penciptaan lapangan kerja;
- Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga-lembaga pendidikan formal;
- Meningkatnya jumlah pencari kerja dari luar daerah ke Kabupaten Malinau.

Tabel. 10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Mengembangkan produk unggulan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Taraget	Realisasi		Taraget	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
persentase desa yang memiliki produk unggulan	%	25	18	72%	27,5	27,5	100%

Dari tabel diatas bahwa sasaran Mengembangkan produk unggulan dengan indikator kinerja persentase desa yang memiliki produk unggulan untuk tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100% dari target 27,5% dan realisasi 27,5%.

Capaian kinerja tahun 2018 100% karena target 30 desa dari 109 desa yang memiliki produk unggulan yang telah dikembangkan. Produk unggulan desa yang dikembangkan meliputi tanaman pangan seperti padi dan ubi kayu. Tigapuluh desa yang dimaksud tersebar di kecamatan malinau utara, kecamatan malinau barat, kecamatan mentarang dan kecamatan malinau kota.

Misi 6 : Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;

Tujuan 6 : Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri

Pengukuran Tujuan 6 **Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan industri** melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Targett	Realisasi		Targett	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat pertumbuhan perdagangan	%	-	-	-	5,66	5,66	100%

Dari tabel diatas sasaran Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari sektor perdagangan dengan indikator kinerja Tingkat pertumbuhan perdagangan yang ditargetkan tahun 2018 adalah 5,66, realisasi 5,66 dengan capaian tahun 2018 adalah 100% artinya sudah terpenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini karena adanya peningkatan atau pertambahan pelaku usaha yang ada sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat keluarga giat perkembangan usaha.

Tabel. 12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Targett	Realisasi		Targett	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingkat pertumbuhan industri	%	-	-	-	17,01	60	352%

Dari tabel diatas dengan sasaran Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa dengan indikator kinerja Tingkat pertumbuhan industri yang ditargetkan tahun 2018 adalah 17,01 dengan realisasi 60 dan 352%.

Misi 7 : Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;

Tujuan 7 : Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Harmonis, Rukun Dan Damai

Pengukuran Tujuan 7 mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai secara luas melalui 2 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Meningkatnya Fasilitas Layanan Keagamaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Targe t	Realisas i		Targe t	Realisas i	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	Rasio	1:500	1:500	100%	1:450	1:325	72,22%

Pada tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi rasio tempat ibadah per penduduk untuk tahun 2018 1:325 hal ini karena bertambahnya rumah ibadat di Kabupaten Malinau. Jumlah rumah ibadat di Kabupaten Malinau tahun 2018 sebanyak 260 sedangkan jumlah penduduk kabupaten malinau tahun 2018 sebanyak 79.903 jiwa.

Tabel. 14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Terjadinya Keamanan dan Ketertiban dari Konflik SARA

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Taraget	Realisasi		Taraget	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase konflik antar suku, agama dan ras	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Pada tabel diatas dengan sasaran terjadinya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA dengan indikator persentase konflik antar suku, agama, ras dan golongan dengan target 0% dan realisasi 0%. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik pihak keamanan, pemerintahan, tokoh-tokoh mayarakat, tokoh-tokoh adat, pemuka agama, organisasi pemuda, organisasi wanita dan semua masyarakat Kabupaten Malinau untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar suku, agama ras dan golongan.

Misi 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;

Tujuan 8 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA

Pengukuran Tujuan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kelestarian SDA secara luas melalui 1 Sasaran dengan 2 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15
Meningkatnya kualitas air dan udara

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks kualitas air	Nilai	0<IP<5,0	49	81,25%	0<IP<0,5	4,02	100,5%
Indeks kualitas udara (ISPU)	Nilai	51-100	92,87	92,87%	0-50	91,51	183,02 %

Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa pencapaian sasaran indeks kualitas air tahun 2017 sebesar 3,25 dan tahun 2018 sebesar 3,29. Hal ini berarti bahwa kondisi kualitas air tersebut statusnya **tercemar ringan** (sesuai dengan kategori kelas indeks polusi, yaitu $1,0 < IP \leq 5,0$ = tercemar ringan) dan pencapaian ini masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2017 dan 2018. Sedangkan untuk pencapaian sasaran indeks kualitas udara (ISPU) Kabupaten Malinau di tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 92,87 dan 102,43. Besaran pencapaian indeks kualitas udara di tahun 2017 menunjukkan kategori sedang (sesuai dengan tabel Rentang Indeks Standar Pencemar Udara dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP 45 / MENLH / 1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara), yang artinya tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan atau nilai estetika sedangkan untuk tahun 2018 menunjukkan **kategori sedang**, yang artinya tingkat kualitas udara yang bersifat yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Dan pencapaian indeks kualitas udara ini tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu pada rentang 0-50.

Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Tujuan 9 : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Pengukuran Tujuan 9 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel secara luas melalui 1 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel 16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Status laporan keuangan daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
Nilai Sakip	Nilai	CC	CC	100%	B	CC	86.3%
Nilai LPPD	Status	Tinggi	Tinggi	100%	Tinggi	Tinggi	100%

Pada tabel.16 diatas dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja:

- Capaian Status laporan keuangan daerah Kabupaten Malinau tahun 2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan mencapai target dikarenakan;
 - Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara atas Laporan Hasil Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan;
 - Pelaporan keuangan telah berbasis Akrual (Accrual Basis) yaitu akuntansi yang memberikan gambaran lebih akurat dan kompleks atas kondisi keuangan organisasi, karena telah mencatat semua transaksi pengeluaran dan penerimaan kas serta jumlah hutang dan piutang;

- Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan laporan keuangan, telah memenuhi syarat-syarat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- Capaian indikator kinerja nilai sakip tahun 2018 mencapai 51,78. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan nilai SAKIP jika dibandingkan dengan tahun 2017 yakni nilai SAKIP 50,35. Walaupun mengalami peningkatan nilai tetapi untuk predikat SAKIP masih CC.
- Nilai LLPD Kabupaten Malinau tahun 2018 adalah 2.93390 dengan status Tinggi.

Misi 10 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;

Tujuan 10 : Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Pengukuran Tujuan 10 Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan secara luas melalui 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

Tabel. 17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17
Meningkatnya kesetaraan gender

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Targe t	Realisas i		Targe t	Realisas i	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks pembangunan gender	%	84%	64,35%	76,60%	85	73,77	86,78%

Tabel. 18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 18
Meningkatnya pemberdayaan gender

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Tar get	Realisa si		Tar get	Realisa si	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks pemberdayaan gender	%	65%	69,28%	106%	70%	73,78%	105,4%

Dari tabel diatas (17 dan 18) dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya kesetaraan gender dan meningkatnya pemberdayaan gender dengan indikator kinerja indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender dengan capaian pada 2018 masing-masing sebesar 86,78% dan 105,4%. Indeks pembangunan gender dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan capaian melebihi target dikarenakan:

- Menghilangnya anggapan bahwa perempuan kodratnya hanya sebagai pengurus rumah tangga dan bukan sebagai penunjang kebutuhan keluarga.
- Adanya dorongan perempuan dalam meningkatkan kapasitasnya dan ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat.
- Memberikan bimbingan dan motivasi disegala bidang tentang pentingnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga.

Tabel. 19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19
Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Tar get	Realisa si		Tar get	Realisa si	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	65%	65%	100%	75%	72%	96%

Organisasi kepemudaan mempunyai banyak manfaat. Tidak hanya mendapat teori organisasi tetapi banyak mendapat pengalaman langsung mengenai manajemen organisasi, budaya organisasi, komunikasi organisasi dan pengembangan organisasi. Selain itu juga mengasah jiwa kepemimpinan dan kebijaksanaan diri bagi para pemuda ketika mereka aktif didalam organisasi. Pada tabel diatas evaluasi sasaran meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan dengan indikator kinerja persentase organisasi kepemudaan yang aktif untuk tahun 2018 dengan capaian 96% dari target 75% dengan capaian 72%. Pada tahun 2018 realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan karena ada beberapa faktor yakni;

- Pengurus organisasi kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya.
- Minimnya anggaran yang dimiliki organisasi sehingga aktivitas/kegiatan tersebut kurang berjalan.
- Lambatnya regenerasi (pengkaderan) sehingga organisasi kurang berkembang.
- Visi dan misi berdirinya suatu organisasi harus jelas arah tujuannya.
- Pengalaman pengurus organisasi masih minim

Misi 11 : Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;

Tujuan 11 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata

Pengukuran Tujuan 11 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata secara luas melalui 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut;

Tabel. 20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Targe t	Realisas i		Targe t	Realisas i	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah wisatawan	Orang	5.630	5.172	91,86%	6,500	35,823	551,12 %

Kabupaten Malinau memiliki berbagai macam objek wisata, baik objek wisata alam maupun wisata budaya. Tingkat kunjungan wisata di berbagai objek di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diketahui bahwa wisatawan yang berkunjung ke berbagai objek wisata pada umumnya adalah wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Pada tabel diatas pencapaian sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator kinerja jumlah wisatawan pada target tahun 2018 adalah 5,500 orang dengan realisasi 35,823 orang. Pada tahun 2018 peningkatan kunjungan wisata mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan pada tahun 2018 ada dua event besar yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau yakni Aco Lundayeh pada bulan juli dan IRAU bulan Oktober 2018.

Tabel. 21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 21
Meningkatkan Kualitas Seni dan Budaya Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Targe t	Realisas i		Targe t	Realisas i	
1	2	3	4	5	6	7	8
Percentase sanggar seni yang aktif	%	29	29	100%	90	34	37,78%

Pada tabel diatas capaian kinerja tahun 2018 adalah 37,78%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi dan capaian tersebut antara lain;

- a. Sanggar seni belum mandiri dalam pelaksanaan pagelaran seni.
- b. Banyak komunitas seni yang belum terdaftar secara resmi dalam bentuk pendaftaran sanggar seni.

c. Pembekalan atau pembinaan terhadap manajemen sanggar-sanggar seni belum maksimal.

Tabel. 22
Evaluasi Pencapaian Sasaran 22
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase situs budaya yang terdaftar di kementerian kebudayaan	%	12	12	100%	57	-	-

Pada tabel diatas dengan sasaran meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah dengan indikator kinerja persentase situs budaya yang terdaftar di kementerian kebudayaan untuk tahun 2018 tidak ada kegiatan, kegiatan baru akan dilaksanakan di tahun 2019.

Misi 12 : Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat;

Tujuan 12 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Baik Dan Prima

Pengukuran Tujuan 10 Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Baik Dan Prima secara luas melalui 1 Sasaran dengan 1 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut

Tabel. 23
Evaluasi Pencapaian Sasaran 23
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017 %	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018 %
		Targe t	Realisa si		Targe t	Realisa si	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks kepuasan masyarakat(IKM)	Indeks	C	C	100%	CC	C	97,40%

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam penyusunan SKM terdapat 9 (Sembilan) unsur yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya / tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan saran serta masukan, sarana dan prasarana.

Untuk meningkatkan keberhasilan capaian indikator sasaran diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

- Peningkatan percepatan pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan peningkatan;
- Peningkatan ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Menginformasikan hasil dari pada survei kepuasan masyarakat kepada publik.

C. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018

URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%
1	2	4	5
PENDAPATAN – LRA	1.390.904.401.228,64	1.355.203.636.062,14	97,43
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PDA) - LRA	57.188.174.548,64	54.953.180.401,89	96,09
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	10.462.319.900,00	8.702.286.031,40	83,18
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	1.238.450.000,00	2.340.910.905,00	189,02
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan -LRA	5.756.333.000,00	5.889.163.498,47	102,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA	39.731.071.648,64	38.020.819.967,02	95,70
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.333.716.226.680,00	1.282.161.537.858,77	96,13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.125.275.135.599,00	1.089.349.742.371,00	96,81
Bagi hasil pajak – LRA	41.088.938.379,50	29.574.493.073,00	71,98
Bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam - LRA	156.143.738.219,50	139.126.380.435,00	89,10
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	798.139.775.000,00	797.274.656.000,00	99,89
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	83.980.000.000,00	81.083.079.922,00	96,55
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	45.922.684.000,00	42.291.132.941,00	92,09
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LRA	166.624.624.000,00	153.169.224.000,00	91,92
Dana Penyesuaian - LRA	166.624.624.000,00	153.169.224.000,00	91,92
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LRA	28.304.467.081,00	29.508.571.487,77	104,25
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	28.304.467.081,00	29.508.571.487,77	104,25
Bantuan Keuangan -LRA	13.512.000.000,00	10.134.000.000,00	75,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya -LRA	13.512.000.000,00	10.134.000.000,00	75,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	18.088.917.801,48	0,00
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	5.704.717.801,48	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	12.384.200.000,00	0,00
BELANJA	1.141.050.192.661,07	1.064.237.806.883,12	93,27
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	957.838.371.018,32	892.223.896.002,93	93,15
Belanja Barang dan Jasa	487.403.336.465,32	459.130.216.654,00	94,20
Belanja Subsidi	397.914.831.261,00	370.040.666.547,00	92,99
Belanja Hibah	3.973.874.400,00	360.659.600,00	9,08
Belanja Bantuan Sosial	66.476.597.292,00	62.391.162.701,93	93,85
BELANJA MODAL	182.775.223.642,75	172.008.410.880,19	94,11
Belanja Modal Tanah	1.871.701.000,00	1.767.981.289,00	94,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.585.056.597,00	35.206.371.770,00	78,96
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.142.022.900,00	21.924.797.602,19	99,02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.741.443.145,75	112.681.572.469,00	99,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	405.000.000,00	397.687.750,00	98,19
BELANJA TAK TERDUGA	436.598.000,00	5.500.000,00	1,26
Belanja Tak Terduga	436.598.000,00	5.500.000,00	1,26
TRANSFER	270.018.724.000,00	270.018.723.980,00	100,00

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	270.018.724.000,00	270.018.723.980,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	270.018.724.000,00	270.018.723.980,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT	(20.164.515.432,43)	20.947.105.199,02	(103,88)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	22.164.515.432,43	21.586.670.134,57	97,39
Penggunaan SILPA	22.164.515.432,43	21.585.070.134,57	97,59
Penerimaan Kembali Piutang lainnya	0,00	1.600.000,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	20.164.515.432,43	19.585.670.134,57	97,13
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	40.533.775.333,59	0,00

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2018 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau selama tahun 2018 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Dimasa mendatang Pemerintah Kabupaten Malinau akan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan kinerja ini. Berbagai hasil yang telah diraih oleh Kabupaten Malinau selama ini akan selalu dijadikan modal berharga untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang terjadi dijadikan pelajaran berharga untuk melangkah menuju Malinau yang lebih baik di hari esok.

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2018, dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk tahun-tahun mendatang akan tetap difokuskan pada;

- Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.
- Peningkatan tata kelolah kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Goverment*).
- Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik.
- Penegakan hukum dan perundang-undang, serta perbaikan dalam sistem informasi kinerja pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.
- Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

Dengan tersusunnya Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2018 ini, di harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun fisik lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,26	Tahun	12 ,89	97,20%
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,61	Tahun	8,47	98,37%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	71,50	Tahun	71,3	99,7%
		Prevalensi Balita Stunting	26,5	%	32,2	121%
3	Menurunnya kemiskinan di perdesaan	Persentase penduduk miskin	7,62	%	7,68	99,21%
4	Meningkatnya partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	Tingkat partisipasi yang aktif terlibat dalam musrenbang	36,73	%	36,73	100%
5	Meningkatnya infrastruktur daerah baik perkotaan maupun perdesaan	Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	20	%	49,82	249%
		Persentase desa dengan akses air bersih yang berkualitas	69	%	104	150%
6	Meningkatkan konektivitas antar kecamatan	Persentase desa yang terjangkau komunikasi	80	%	92,7	115,8%
7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada ekonomi desa	Pendapatan perkapita masyarakat	90.331.820	Rp	425.000.00	470%
8	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi	Indeks Gini	0,300	Nilai	0,300	100%
9	Terbukanya lapangan pekerjaan	Menurunnya angka pengangguran	8,51	%	6,77	120,4%
10	Mengembangkan produk unggulan	Persentase desa yang memiliki produk unggulan	27,5	%	27,5	100%
11	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan dari	Tingkat pertumbuhan perdagangan	5,66	%	5,66	100%

	sektor perdagangan					
12	Meningkatnya nilai tambah dan pendapatan industri barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan industri	17,01	%	60	352%
13	Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Rasio Tempat Ibadah per Penduduk	1:450	Rasio	1:325	72,22%
14	Terjaganya keamanan dan ketertiban dari konflik SARA	Persentase konflik antar suku, agama dan ras	0%	%	0%	0%
15	Meningkatkan kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	0<IP<5,0	Indeks	4,02	100,5%
		Indeks kualitas udara(ISPU)	0-50	Indeks	91,51	183,02%
16	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Status laporan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	Opini	WTP	100%
		Nilai Sakip	B	Nilai	CC	86,03%
		Nilai LPPD	Tinggi	Status	Tinggi	100%
17	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender	85%	%	73,77	86,78%
18	Meningkatnya Pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender	70%	%	73,78	105,4%
19	Meningkatnya kontribusi organisasi kepemudaan dalam pembangunan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	75%	%	72%	96%
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	6.500 Orang	Jumlah	35.823	551,12%
21	Meningkatkan kualitas seni dan budaya daerah	Persentase sanggar seni yang aktif	90	%	34	37,78%
22	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase situs budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan	57	%	-	-
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	CC	Indeks	C	97,40%

**DAFTAR KEBERHASILAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2018**

NO	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN
1	Rekor Muri pawai budaya dengan peserta terbanyak menggunakan pakaian bhineka tunggal ika	2018
2	Kategori desa wisata dengan rumah terbanyak berhias motif etnik	2018
3	Rekor Muri lobang lesung terbanyak	2018
4	Rekor Muri alu terbanyak	2018
5	Rekor Muri tungku terpanjang	2018
6	Rekor Muri kelantung (kentongan kayu) terbanyak	2018
7	Rekor Muri bepupur dengan peserta terbanyak	2018
8	Rekor Muri kategori pegelaran musik sampai terbanyak	2018
9	Rekor Muri perisai terpanjang	2018
10	Rekor Muri Ani Ka'bo (kalung dan buah kalung) terbesar	2018
11	Rekor Muri untuk gelaran IRAU ke 19 dengan memperoleh rekor buba terpanjang	2018
12	Penghargaan Top BUMD	2018